

Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Disampaikan pada kegiatan Kick-off Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rabu, 21 Juni 2023



Pesan Kunci

- Pertumbuhan ekonomi hijau NTT bertujuan untuk mendorong pencapaian target pembangunan hijau yang berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya.
- Proses perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau (*Green Growth Plan/GGP*) NTT dilakukan melalui kajian iteratif terhadap beberapa skenario pembangunan yang mempertimbangkan aspek kebutuhan lahan, tatanan sosial, kebijakan alokasi dan kesesuaian lahan, serta peningkatan nilai produk maupun perbaikan pasar.
- Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau disusun berdasarkan data, informasi dan pemodelan dengan prinsip *informed* (berbasis proyeksi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan), *inclusive* (melibatkan pemangku kepentingan), dan *integrative* (mendorong sinergi dan memadukan tujuan konservasi, pembangunan dan perencanaan tata ruang).

Pengantar

Pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan inisiatif yang mendasari perancangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau selaras dengan komitmen global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs), serta program dan target Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nasional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi hijau NTT bertujuan untuk mendorong pencapaian target pembangunan hijau yang berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya.

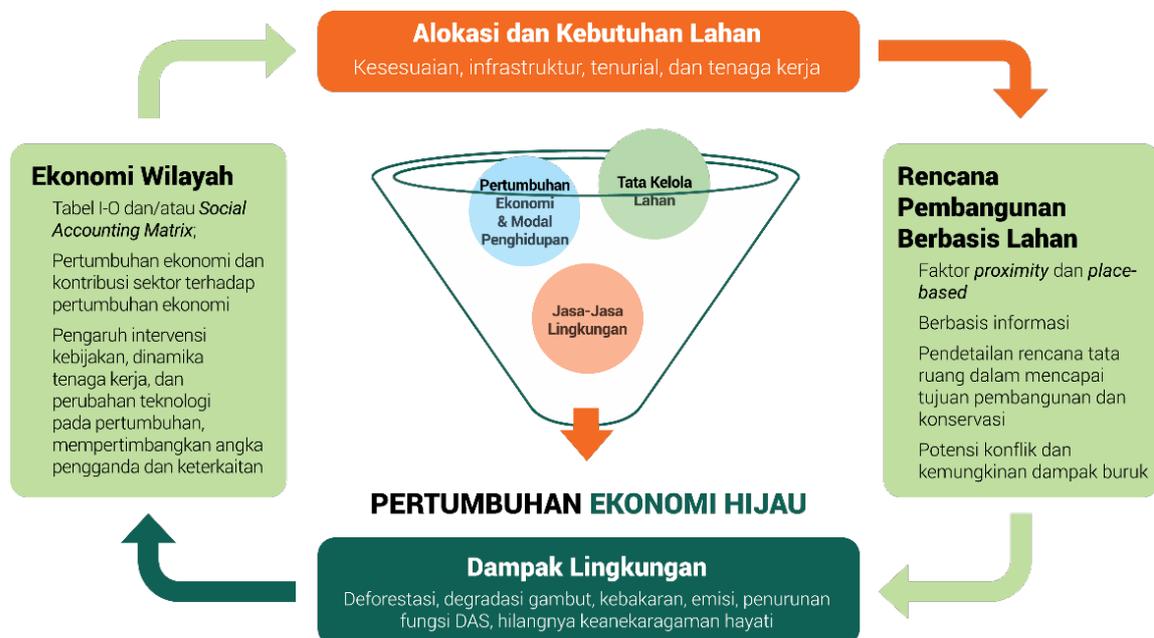
Secara nasional rencana pertumbuhan ekonomi hijau diharapkan dapat mendukung pencapaian *nationally determined contributions* (NDC) dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan strategi adaptasi. Pada tahun 2022, Indonesia merilis laporan Enhanced NDC yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31.8% (dan 43.2% dengan dukungan internasional) serta implementasi adaptasi pada sektor strategis pangan, air, dan energi. NTT dalam dokumen NDC Indonesia, termasuk ke dalam wilayah terkering yang berisiko lebih parah dengan adanya perubahan iklim. Sedangkan kondisi ekonomi menunjukkan bahwa ketimpangan PDRB per kapita tiga kali lebih besar dibandingkan Pulau Jawa.

Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi NTT akan membantu untuk mengintegrasikan faktor kesesuaian iklim dengan perencanaan pengelolaan lahan. Penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau akan menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau yang responsif gender dan mengintegrasikan aspek ketahanan pangan. Hal ini berkesesuaian dengan potensi dan tantangan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi NTT.

Provinsi NTT akan menyusun rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau dengan komitmen dan keterlibatan para pihak. Rencana Induk disusun dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah dalam mencapai tujuan bersama secara inklusif, integratif dan berbasis informasi. Komitmen para pemangku kepentingan pada tingkat provinsi maupun kabupaten untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau diwujudkan dalam pengarusutamaan ke dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau disusun berdasarkan skenario yang dituangkan secara spasial dalam rencana induk. Dilengkapi dengan dokumen peta jalan yang mencakup kebijakan pendukung; strategi, intervensi, dan program, serta indikator pertumbuhan ekonomi hijau yang terkait dengan indikator SDGs sebagai dasar untuk pemantauan dan evaluasi.

Inisiatif dan Komitmen Provinsi NTT Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Pemerintah Provinsi NTT, telah memperlihatkan komitmen dan inisiatif dalam mengambil peranan dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Inisiatif tersebut mencakup upaya untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan kehutanan dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut melalui penguatan kemitraan antara sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati konservasi, dan masyarakat sipil. NTT telah menghadapi momentum yang tepat untuk memulai transformasi menuju pertumbuhan ekonomi hijau melalui dukungan politis, jaringan kerja, dan sumber daya alam yang melimpah.



Gambar 1. Proses perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau NTT

Penyusunan rencana makro dan peta jalan Pertumbuhan Hijau NTT melalui proses yang melibatkan pemangku kepentingan, mempertimbangkan semua aspek serta didukung oleh data dan analisa yang

sahih. Rencana dan peta jalan tersebut harus mampu mengakomodasi permintaan global terhadap produk-produk bernilai ekonomi tinggi, sambil tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi hijau yang sehat dan menjamin kesetaraan penghidupan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Melalui perencanaan yang baik, NTT bukan hanya akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hijau namun juga bisa menjadi teladan serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Proses perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau (*Green Growth Plan/GGP*) NTT dilakukan melalui kajian iteratif terhadap beberapa skenario pembangunan yang mempertimbangkan aspek kebutuhan lahan untuk berbagai fungsi dari berbagai pemangku kepentingan, tatanan sosial, kebijakan alokasi lahan, kesesuaian lahan, manfaat ekonomi (pada skala regional, usaha, petani) maupun aspek lingkungan sehingga bisa diperoleh rencana tata guna lahan, opsi praktik silvikultur yang ramah lingkungan untuk komoditi unggulan, peningkatan nilai produk maupun perbaikan pasar (Gambar 1).

Pendekatan dan Metodologi Penyusunan Rencana

Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau disusun berdasarkan data, informasi dan pemodelan. Adapun prinsip yang digunakan dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau, antara lain:

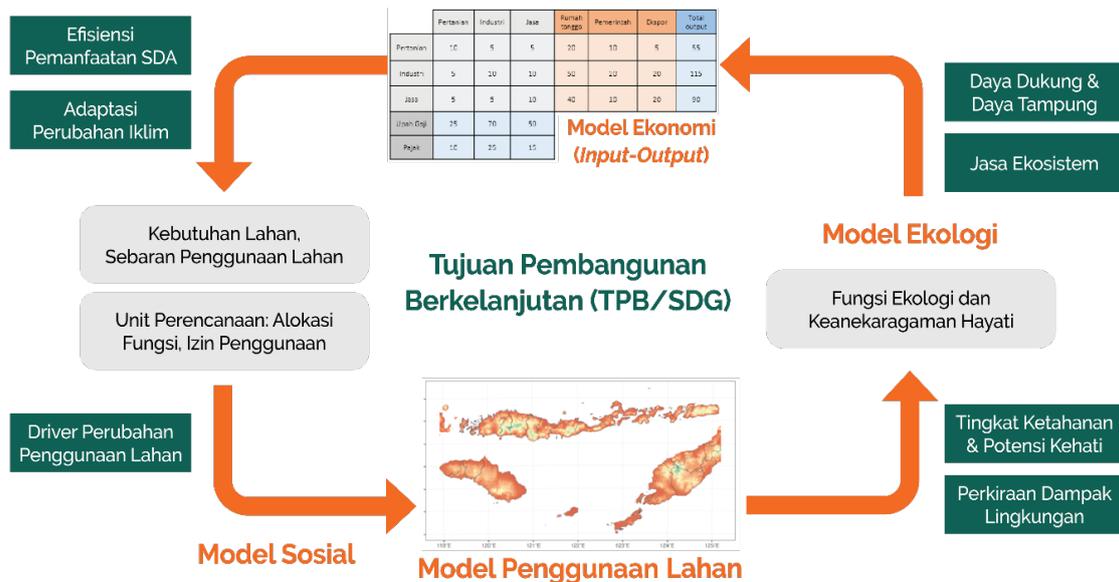
- *Informed*: Proyeksi dampak sosial, ekonomi maupun lingkungan dari skenario *Green Growth* dimodelkan menggunakan data dan informasi yang akurat (Satu Data Indonesia) sebagai dasar analisa *trade-off* untuk memilih skenario pembangunan yang paling sesuai.
- *Inclusive*: Melibatkan para pemangku kepentingan dalam mendiskusikan aspirasinya dan menegosiasikan rencana yang akan disetujui bersama. Strategi dan intervensi menengahkan masyarakat, pengetahuan dan konteks lokal.
- *Integrative*: Menitikberatkan pentingnya proses sinergi dan memadukan berbagai tujuan konservasi, pembangunan, perencanaan tata ruang, dengan menghindari silo.

Pemodelan pertumbuhan ekonomi hijau dibangun dari pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai proses pembangunan yang kontekstual pada kewilayahan dan mencakup dinamika keruangan maupun waktu. Simulasi dari skenario pembangunan menggunakan perangkat lunak LUMENS (*Land-Use Planning for Multiple Environmental Services*) yang dirancang untuk menghasilkan proyeksi (*ex-ante*) kinerja yang diukur berdasarkan indikator makro yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Gambar 2).

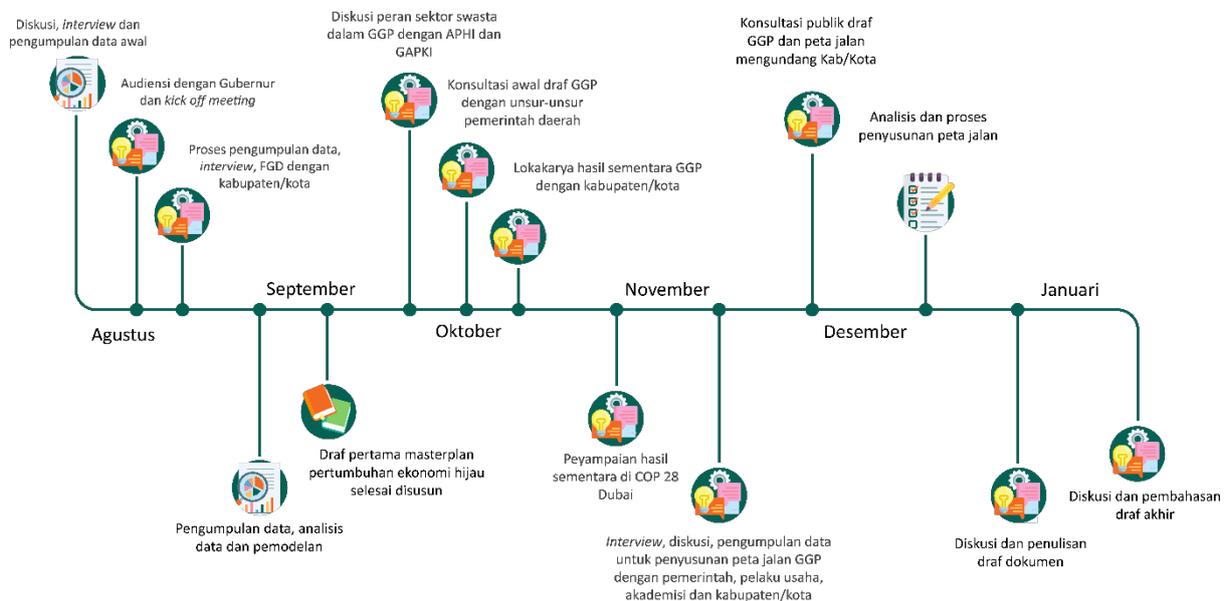
Sistem pertumbuhan ekonomi hijau dimodelkan sebagai sistem ekonomi regional menggunakan model *Input-Output*, dimana sektor lahan melakukan transaksi dengan sektor lain. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dari sektor lahan diterjemahkan ke dalam kuantifikasi luasan kebutuhan lahan untuk komoditas unggulan tertentu. Lokasi yang memungkinkan untuk terjadinya perluasan, intensifikasi maupun alihguna lahan berdasarkan infrastruktur, tutupan dan ketersediaan lahan dimodelkan secara *spatially explicit* untuk menghasilkan proyeksi peta tutupan/penggunaan lahan yang kemudian digunakan untuk mengkuantifikasi perubahan fungsi dan jasa ekosistem yang diakibatkan perubahan lahan. Dampak ini akan selanjutnya menjadi umpan balik kepada ekonomi regional.

Analisis dan pemodelan beberapa skenario pembangunan (skenario Bisnis Seperti Biasa atau *Business as Usual/BAU*) dan pertumbuhan ekonomi hijau menghasilkan peta intervensi, proyeksi peta tutupan/penggunaan lahan, proyeksi besaran dari indikator makro berdasarkan skenario pembangunan. Hasil di atas digunakan dalam pembuatan rencana induk dan peta jalan pertumbuhan

ekonomi hijau, yaitu dengan proses: (i) peta intervensi akan memberikan arahan program dan kegiatan sebagai bagian proses perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek daerah mendukung peninjauan kembali RTRWP, menyinergikan RPJMD kabupaten dan RTRWK dengan provinsi; (ii) peta proyeksi berguna untuk mengarahkan RTRWP dan RTRWK, mengantisipasi bencana dari dampak negatif alihguna lahan maupun praktik pengelolaan lahan tidak berkelanjutan, yang diperoleh dari analisa kuantitatif fungsi dan jasa lingkungan yang terdampak oleh alihguna lahan dan praktik lahan; (iii) analisa *trade-off* membandingkan berbagai skenario pembangunan dan berbagai dimensi keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan).



Gambar 2. Kerangka analisis pertumbuhan ekonomi hijau NTT



Gambar 3. Lini masa penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau

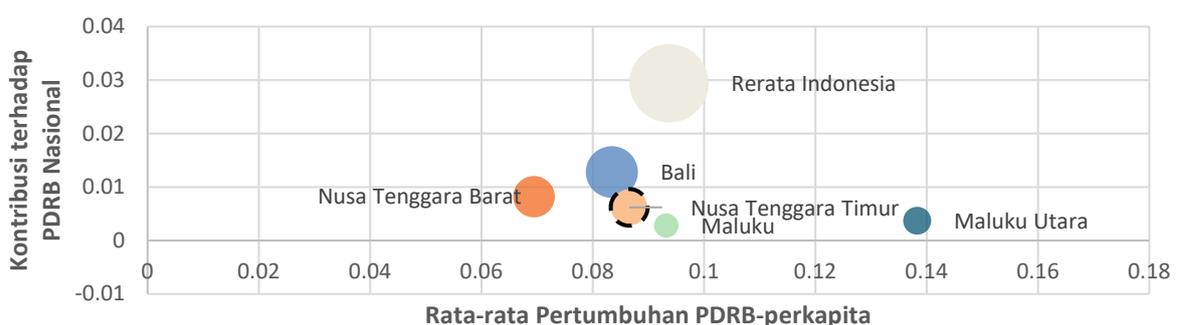
Secara keseluruhan keluaran ini berguna untuk menegosiasikan dan memilih skenario dengan *trade-off* terbaik yang bisa diterima semua pihak, serta bisa merekomendasikan modifikasi yang perlu

dilakukan dalam skenario yang sudah dibangun. Proses ini sealur dengan proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menginterpretasikan ambang batas daya dukung dan daya tampung wilayah. Ilustrasi lini masa penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau selama jangka waktu 1 tahun dapat dilihat pada Gambar 3.

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

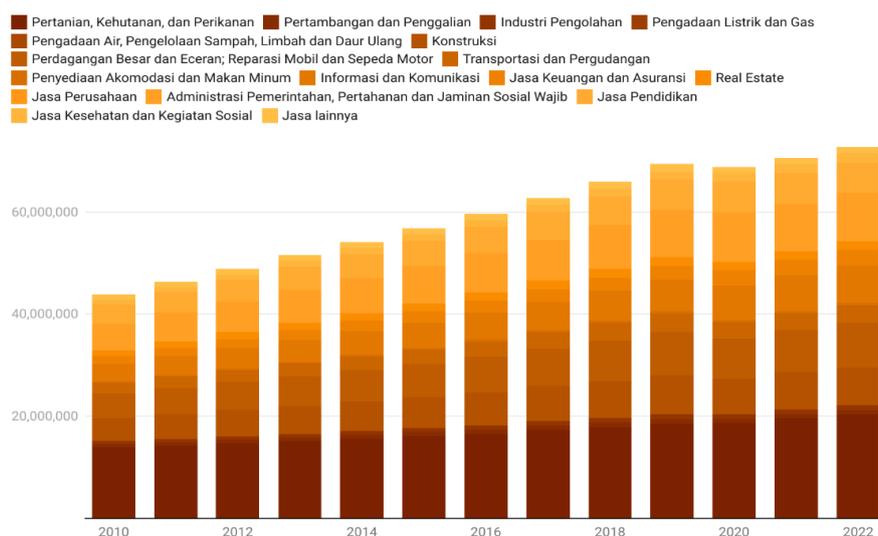
Ekonomi wilayah

PDRB NTT pada tahun 2022 menempati urutan ke-27 dari 34 provinsi. Kontribusi PDRB Provinsi NTT masih cukup jauh di bawah rerata provinsi lain di Indonesia. Apabila dilihat secara regional provinsi-provinsi kepulauan di timur Indonesia, NTT menempati urutan ketiga laju pertumbuhan PDRB (2010-2022), dengan besaran PDRB juga berada pada urutan yang sama.



Gambar 4. PDRB Provinsi Kepulauan di Timur Indonesia

Ekonomi Provinsi NTT ditopang oleh sektor berbasis lahan dengan kontribusi paling besar berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang pada tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 29,6 persen (Gambar 4). PDRB menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun meskipun mengalami perlambatan pada tahun 2019 ke 2020. Pada tahun 2022, perekonomian NTT mengalami pertumbuhan sebesar 3,05 persen.



Gambar 5. PDRB ADHK NTT 2010-2022

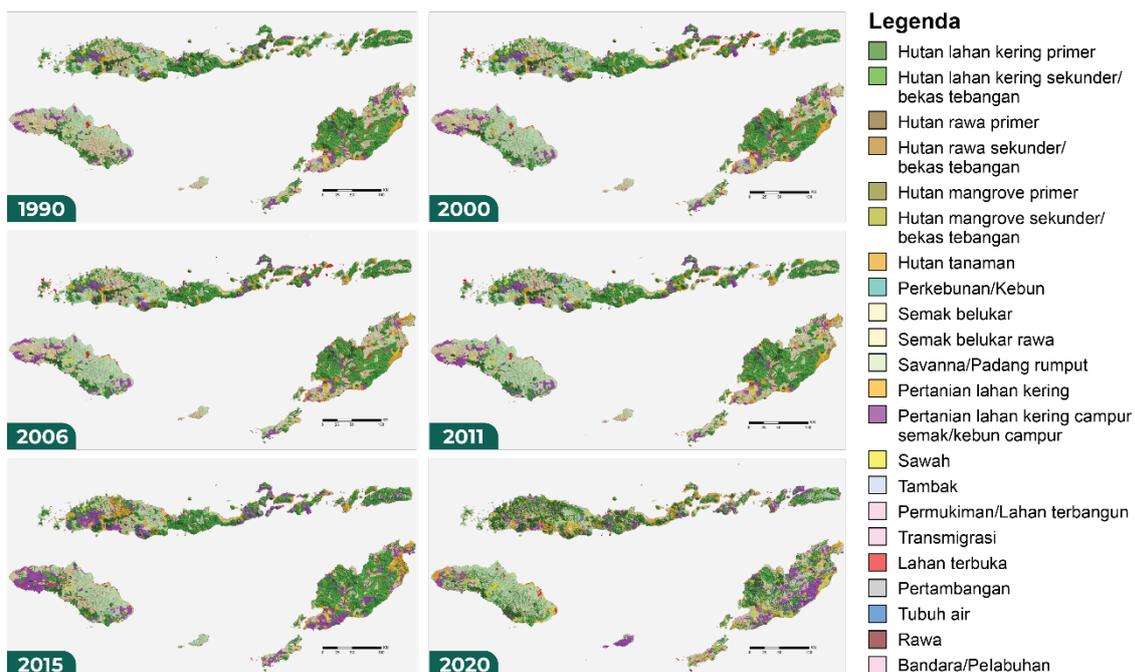
Dinamika penggunaan lahan dan fungsi ekosistem

Perubahan mengindikasikan pergeseran penggunaan lahan di Provinsi NTT selama periode 1990-2020, tren menunjukkan peningkatan lahan pertanian dan permukiman. Pada kelas tutupan hutan terjadi penurunan pada hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove primer. Kelas penggunaan lahan sawah menjadi salah satu yang bertambah dengan signifikan, meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa periode. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perubahan pola tanam, kebijakan pertanian, serta faktor-faktor seperti kekeringan atau banjir yang mempengaruhi produktivitas lahan sawah. Peningkatan kelas penggunaan lahan permukiman mengindikasikan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perkembangan infrastruktur perkotaan di Provinsi NTT (Gambar 6).

	1990	2000	2006	2011	2015	2020
Hutan lahan kering primer	2	190,754				526
Hutan lahan kering sekunder	1,600,271	1,581,695	1,564,011	1,566,276	1,748,588	1,124,377
Hutan rawa primer	97	97	0	0	0	0
Hutan rawa sekunder	702	485	483	483	483	254
Hutan mangrove primer	15,195	14,635	14,385	14,249	13,617	11,279
Hutan mangrove sekunder	8,186	7,456	7,669	7,600	9,425	12,128
Hutan tanaman	17,902	8,532	526	526	3,206	8,590
Perkebunan	2,462	3,530	0	0	144	1,842
Semak/Belukar	1,214,591	927,914	981,303	983,503	56	46
Belukar rawa	8,706	10,466	10,466	10,677	3,944	1,078
Savana	842	1,056,043	1,027	1,032	851	1,042,258
Pertanian lahan kering		251,338				34
Pertanian Lahan Kering campur semak	3	380,620	3	3	68	588
Sawah	52,017	53,787	60,172	64,377	79,848	2
Tambak	1,040	1,391	1,422	1,422	1,631	9,897
Permukiman	33,836	38,993	39,118	40,259	68,455	
Transmigrasi	0	0	0	246	39	593
Tanah terbuka	53,805	100,945	98,903	46,699	98,778	29,262
Pertambangan	0	0	0	0	0	53
Tubuh air	3,182	2,083	2,158	2,182	5,631	29,324
Rawa	5,953	6,113	6,113	6,009	5,513	1,529
Awan	96	96	0	0	0	0

Gambar 6. Luas tutupan lahan NTT 1990-2020

Peningkatan lahan pertanian, terutama lahan sawah, dapat memerlukan penggunaan air yang lebih intensif. Hal ini dapat berdampak pada *trade-off* ketersediaan air untuk keperluan lain, seperti konsumsi air domestik, kegiatan industri, dan kelestarian ekosistem air. Pada sisi lain, luas tutupan hutan sekunder juga terus menurun (Gambar 7), padahal hutan sekunder merupakan salah satu area tangkapan air untuk berbagai jasa ekosistem. Perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup untuk semua sektor. Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau dapat memperhitungkan *trade-off* dari berbagai keputusan yang diambil dalam berbagai kebijakan perencanaan daerah.



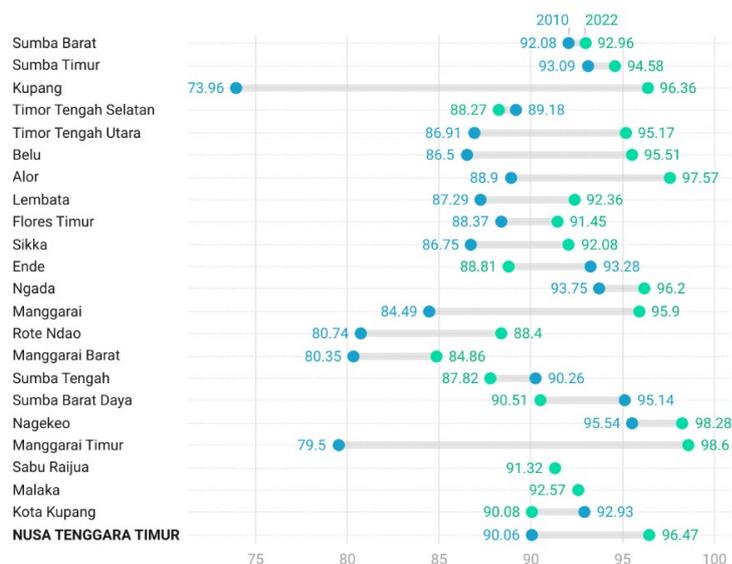
Gambar 7. Peta tutupan/penggunaan lahan NTT 1990-2020

Pengelolaan SDA yang berkeadilan (Gender)

Analisa gender memberikan perspektif pembangunan yang menyeluruh dan mempertimbangkan identitas dari semua yang terlibat dalam suatu proses pembangunan tersebut. Mengetahui bagaimana beragam identitas ini mempengaruhi individu dan kelompok masyarakat mempersepsikan pembangunan menjadi penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Berdasarkan konsep analisis berbasis gender (*gender-based analysis*), beberapa identitas gender diantaranya meliputi: jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, budaya, suku, usia, agama, posisi geografis, kebutuhan khusus, dan bahasa. Meski demikian, persoalan gender sering kali luput dari pembahasan ekonomi yang berbasis pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat berbagai macam ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam secara gender, baik secara akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaat.

Ketimpangan pembangunan gender di NTT di antaranya dapat dilihat dari beberapa kondisi sebagai berikut. Capaian Indeks Pembangunan Gender menunjukkan tingkat ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2010 hingga 2022, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Gender di berbagai kabupaten/kota di NTT secara umum mengalami peningkatan, meski terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan seperti Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Kupang. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan gender pada beberapa daerah dilihat dari indikator-indikator pembangunan manusia cenderung variatif, namun secara umum membaik.



Gambar 8. Indeks pemberdayaan gender kabupaten/kota di NTT tahun 2010-2022

Dari aspek ketenagakerjaan, jumlah dan proporsi lapangan kerja utama laki-laki dan perempuan juga mengalami pergeseran. Pada tahun 2015, sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan menjadi lapangan kerja utama bagi perempuan dan laki-laki. Laki-laki cenderung hanya terfokus pada lapangan kerja pertanian dan jasa masyarakat, sedangkan lapangan kerja perempuan cenderung lebih variatif karena juga mencakup sektor industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran serta rumah makan. Pada tahun 2022, ditemukan bahwa meski jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di atas 15 tahun yang berada di sektor pertanian meningkat, namun proporsinya cenderung menurun, sekaligus terjadi peningkatan proporsi laki-laki dan perempuan di sektor lain, seperti sektor perdagangan besar untuk laki-laki dan sektor industri pengolahan dan jasa masyarakat untuk perempuan.

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2015				Tahun 2022			
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan	
	Jumlah tenaga kerja	Persentase						
Listrik, Gas dan Air	3,124	0.25%	413	0.04%	6,571	0.42%	2,096	0.16%
Pertambangan Dan Penggalian	12,861	1.01%	5,574	0.59%	19,788	1.25%	6,951	0.52%
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan dan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	21,296	1.68%	7,884	0.83%	31,886	2.03%	17,408	1.30%
Industri Pengolahan	37,543	2.96%	99,223	10.45%	90,185	5.73%	243,167	18.12%
Bangunan	73,758	5.81%	996	0.10%	119,530	7.60%	3,358	0.25%
Perdagangan Besar Dan Eceran, Rumah Makan	82,659	6.51%	106,450	11.21%	128,953	8.20%	5,124	0.38%
Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	102,575	8.08%	2,516	0.27%	147,248	9.36%	209,876	15.64%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	154,389	12.16%	139,734	14.72%	219,170	13.93%	225,081	16.77%
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan	781,818	61.56%	586,478	61.79%	809,845	51.48%	629,056	48.37%
Total	1,270,023	100.00%	949,268	100.00%	1,573,176	100.00%	1,342,117	100.00%

Gambar 9. Komposisi lapangan kerja utama laki-laki dan perempuan

Terdapat beberapa permasalahan ketimpangan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil FGD bersama DP3A pada bulan November 2022 menghasilkan beberapa isu kesenjangan gender berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, diantaranya yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim pada sektor berbasis alam:

- Dalam kondisi tidak terjadi bencana, perempuan paling banyak bertanggung jawab terhadap pengurusan anak dan tugas domestik dalam keluarga lainnya. Sedangkan dalam kondisi bencana, perempuan juga cenderung diharapkan untuk menyelamatkan anggota keluarga terlebih dahulu, sehingga kerap membahayakan diri sendiri
- Akses pada informasi kebencanaan dan peringatan dini oleh perempuan dan penyandang disabilitas masih minim, menyebabkan perempuan dan penyandang disabilitas kurang siap dan tidak bisa melakukan tindakan-tindakan penyelamatan diri atau pengurangan risiko
- Pencemaran udara akibat emisi kendaraan yang berdampak secara tidak proporsional terhadap kesehatan perempuan
- Akses air bersih belum merata
- Produksi pertanian menurun akibat pergeseran musim tanam dan hama tanaman
- Sarana dan prasarana pertanian yang ramah difabel dan berketahanan iklim masih terbatas
- Pengendalian kawasan permukiman pada daerah rawan bencana dan kawasan penyangga ekosistem belum optimal

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

Informasi Lebih lanjut:

Pokja Penyusunan GGP Provinsi NTT

Bappelitbangda Provinsi NTT

Alamat: Jl. Polisi Militer No. 2, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, NTT (0280) 8333462



In partnership with
Canada



www.lahanuntukkehidupan.id